

Peran Televisi Sebagai Sumber Informasi Politik Kredibel dalam Menjaga Kualitas Demokrasi di Era Media Sosial

**Ni Komang Ayu Sari Emben^{1*}, Sukadi², Sakman³, Ni Komang Apriani⁴, Ni Made
Linda Herawati⁵, I Gede Eka Putra⁶, I Putu Agus Febriana Putra Wijaya⁷**

Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Palangka Raya

Email: ayu.sari@student.undiksha.ac.id, #sukadi.sukadi@undiksha.ac.id, sakman@fkip.upr.ac.id,
apriani.3@student.undiksha.ac.id, linda.herawati@student.undiksha.ac.id,
ekaputra@student.undiksha.ac.id, agus.febriana@student.undiksha.ac.id,

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik secara signifikan, termasuk dalam pola konsumsi informasi masyarakat. Di tengah arus informasi yang cepat dan tidak selalu terverifikasi, televisi masih dipandang sebagai salah satu sumber informasi politik yang memiliki tingkat kredibilitas relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran televisi sebagai sumber informasi politik kredibel dalam menjaga kualitas demokrasi di era media sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, melalui penelusuran dan analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, serta sumber daring yang relevan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa televisi memiliki mekanisme verifikasi, struktur redaksi, serta penerapan kode etik jurnalistik yang membedakannya dari media sosial yang lebih terbuka dan minim kontrol. Dalam konteks demokrasi, keberadaan televisi yang kredibel berkontribusi pada pembentukan opini publik yang lebih rasional serta mendorong akuntabilitas kekuasaan. Meskipun menghadapi tantangan digitalisasi dan pergeseran preferensi audiens, televisi tetap memiliki peran strategis sebagai penyeimbang informasi politik di ruang publik.

Kata kunci: *Televisi, Informasi Politik, Kredibilitas, Demokrasi, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Demokrasi yang sehat mensyaratkan tersedianya warga negara yang memperoleh informasi politik secara memadai, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem demokrasi, informasi bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan prasyarat penting bagi terbentuknya partisipasi politik yang rasional, pengawasan terhadap kekuasaan, serta pengambilan keputusan publik yang berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, media massa memiliki posisi strategis sebagai penyedia informasi, penghubung antara negara dan masyarakat, sekaligus ruang publik bagi pertukaran gagasan politik. Dalam perspektif ruang publik, komunikasi politik yang berlangsung melalui media dapat mendukung proses deliberasi demokratis apabila media mampu menjaga independensi, kualitas informasi, dan keterhubungan antara wacana elite dengan respons masyarakat sipil (Habermas, 2006).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan lanskap komunikasi politik kontemporer. Media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi politik secara cepat, terbuka, dan partisipatif. Perubahan ini pada satu sisi memperluas akses publik terhadap informasi dan mendorong demokratisasi komunikasi. Namun, pada sisi lain, keterbukaan ruang digital juga menimbulkan tantangan serius berupa meluasnya misinformasi, disinformasi, polarisasi politik, serta melemahnya otoritas sumber informasi yang kredibel. Wardle dan Derakhshan (2017) menjelaskan bahwa gangguan informasi dalam ekosistem digital tidak hanya

berkaitan dengan kesalahan informasi, tetapi juga mencakup penyebaran informasi yang sengaja dirancang untuk menyesatkan publik. Dalam konteks politik, kondisi tersebut dapat mengganggu kualitas demokrasi karena masyarakat berpotensi mengambil sikap politik berdasarkan informasi yang tidak akurat.

Fenomena tersebut semakin kompleks karena media sosial bekerja melalui logika algoritmik yang cenderung menampilkan informasi sesuai preferensi, minat, dan riwayat interaksi pengguna. Akibatnya, masyarakat dapat terjebak dalam ruang informasi yang homogen, atau yang sering disebut sebagai gelembung filter dan ruang gema. Dalam situasi semacam ini, individu lebih sering terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri, sementara informasi yang berbeda atau berlawanan cenderung tersaring. Sunstein (2018) menegaskan bahwa fragmentasi informasi di media sosial dapat memperkuat polarisasi karena publik semakin jarang berhadapan dengan argumen yang beragam. Dalam kehidupan demokrasi, kondisi ini berisiko melemahkan kualitas deliberasi publik, mempersempit ruang dialog, dan memperbesar ketidakpercayaan terhadap institusi politik maupun media arus utama.

Di tengah perubahan tersebut, televisi masih memiliki relevansi sebagai sumber informasi politik yang relatif kredibel. Meskipun penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dan mencapai 79,5% pada tahun 2024 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2024), televisi tetap memiliki peran penting karena didukung oleh struktur kelembagaan, sistem redaksi, mekanisme verifikasi, serta regulasi penyiaran. Berbeda dari media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan sering kali tanpa proses penyaringan yang ketat, televisi bekerja melalui prosedur jurnalistik yang lebih terstruktur. Informasi politik yang disiarkan melalui televisi pada umumnya melewati proses peliputan, penyuntingan, pengecekan fakta, dan pertimbangan editorial sebelum disampaikan kepada publik. Mekanisme ini menjadi salah satu dasar yang membuat televisi masih dipandang sebagai sumber informasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan profesional.

Kredibilitas televisi juga berkaitan dengan keberadaan prinsip jurnalistik dan regulasi penyiaran. Dalam konteks Indonesia, lembaga penyiaran televisi terikat oleh Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang mengatur batasan, kewajiban, dan tanggung jawab isi siaran (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012). Selain itu, praktik jurnalistik menempatkan verifikasi sebagai inti dari proses produksi berita. Kovach dan Rosenstiel (2021) menekankan bahwa disiplin verifikasi merupakan pembeda utama antara jurnalisme dengan propaganda, opini, atau informasi yang tidak teruji. Dengan demikian, televisi memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut akurat, berimbang, dan relevan bagi kepentingan publik.

Namun demikian, peran televisi sebagai sumber informasi politik kredibel tidak dapat dipahami secara ideal tanpa melihat tantangan yang dihadapinya. Televisi tetap berhadapan dengan persoalan kepemilikan media, kepentingan ekonomi-politik, persaingan rating, serta tekanan untuk beradaptasi dengan budaya digital. Dalam beberapa kasus, afiliasi politik pemilik media dan orientasi komersial lembaga penyiaran dapat memengaruhi independensi redaksi serta persepsi publik terhadap netralitas pemberitaan. Oleh karena itu,

kredibilitas televisi tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai media arus utama, tetapi juga oleh konsistensi dalam menerapkan prinsip akurasi, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab sosial. McQuail dan Deuze (2020) menegaskan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat, tetapi peran tersebut sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan etika profesional yang dijalankan oleh media.

Kajian mengenai peran televisi sebagai sumber informasi politik kredibel menjadi penting dalam konteks demokrasi di era media sosial. Di satu sisi, media sosial telah memperluas partisipasi masyarakat dalam komunikasi politik. Di sisi lain, media sosial juga menghadirkan risiko penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik. Dalam situasi tersebut, televisi berpotensi berperan sebagai penyeimbang informasi politik melalui mekanisme verifikasi, struktur redaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip jurnalistik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran televisi sebagai sumber informasi politik yang kredibel dalam menjaga kualitas demokrasi di era media sosial, khususnya melalui kontribusinya dalam menyediakan informasi yang akurat, membentuk opini publik yang rasional, serta mendukung akuntabilitas kekuasaan dalam kehidupan demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau *library research*. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai peran televisi sebagai sumber informasi politik yang kredibel dalam menjaga kualitas demokrasi di era media sosial. Studi literatur memungkinkan peneliti menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai gagasan teoretis serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu komunikasi politik, kredibilitas media, disinformasi digital, dan demokrasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi literatur tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan referensi, tetapi juga sebagai proses analitis untuk membangun pemahaman kritis terhadap suatu fenomena berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang tersedia (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta artikel daring yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu televisi sebagai media massa, kredibilitas informasi politik, media sosial, disinformasi, dan kualitas demokrasi. Kriteria sumber yang digunakan mencakup relevansi topik, keterbaruan informasi, kredibilitas penerbit, serta kontribusinya terhadap penguatan argumen penelitian. Literatur yang digunakan terutama berasal dari kajian komunikasi politik, jurnalisme, media massa, media sosial, dan demokrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data akademik, mesin pencari ilmiah, buku referensi, laporan lembaga resmi, serta dokumen regulasi yang berkaitan dengan penyiaran dan pers. Kata kunci yang digunakan dalam proses penelusuran antara lain “televisi dan demokrasi”, “kredibilitas media”, “komunikasi politik”, “media sosial dan disinformasi”, “informasi politik”, serta “kualitas demokrasi”.

Setelah sumber terkumpul, peneliti melakukan seleksi dengan mempertimbangkan relevansi isi, kejelasan argumen, dan keterkaitan sumber dengan fokus kajian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Tahapan analisis dilakukan melalui proses membaca, mengidentifikasi tema utama, mengelompokkan informasi, membandingkan pandangan antarsumber, serta menyintesis temuan-temuan literatur ke dalam pembahasan yang utuh. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kredibilitas televisi sebagai sumber informasi politik, tantangan media sosial dalam penyebaran informasi politik, serta kontribusi televisi dalam menjaga kualitas demokrasi. Proses analisis ini sejalan dengan prinsip analisis data kualitatif yang menekankan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai jenis referensi, baik dari literatur akademik, laporan lembaga, maupun regulasi yang relevan. Triangulasi ini dilakukan agar argumentasi yang dibangun tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber, melainkan diperkuat oleh berbagai perspektif yang saling melengkapi. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai posisi televisi dalam ekosistem informasi politik di era media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, televisi masih memiliki posisi penting dalam ekosistem komunikasi politik, meskipun pola konsumsi informasi masyarakat mengalami pergeseran akibat perkembangan media sosial. Temuan utama dalam kajian ini menunjukkan bahwa kredibilitas televisi sebagai sumber informasi politik terutama ditopang oleh tiga aspek, yaitu mekanisme verifikasi berita, struktur redaksional yang terorganisasi, dan kepatuhan terhadap prinsip etika jurnalistik. Ketiga aspek tersebut membedakan televisi dari media sosial yang bersifat lebih terbuka, cepat, dan partisipatif, tetapi sering kali tidak memiliki mekanisme pengendalian informasi yang memadai.

Dalam sistem demokrasi, kualitas informasi politik memiliki hubungan langsung dengan kualitas partisipasi warga negara. Informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan masyarakat memahami isu politik secara lebih rasional, menilai kinerja pemerintah, serta mengambil keputusan politik secara sadar. Sebaliknya, informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperkuat polarisasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, peran televisi sebagai media arus utama tetap relevan dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama ketika ruang digital dipenuhi oleh arus informasi yang cepat, beragam, dan tidak selalu benar.

Televisi dalam Sistem Komunikasi Politik

Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat luas melalui kekuatan audio-visual. Karakteristik ini membuat televisi mampu menyajikan informasi politik secara lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, televisi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang bagi pertukaran gagasan, pendidikan politik,

pengawasan kekuasaan, dan pembentukan opini publik. Program berita, dialog politik, debat kandidat, wawancara publik, dan siaran langsung peristiwa politik merupakan beberapa bentuk kontribusi televisi dalam kehidupan demokrasi.

Peran televisi dalam membentuk perhatian publik dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting*. Teori ini menekankan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak selalu menentukan bagaimana publik harus berpikir, tetapi media dapat menentukan isu apa yang perlu diperhatikan publik (McCombs & Shaw, 1972). Dalam konteks ini, televisi memiliki pengaruh besar karena isu politik yang mendapatkan ruang pemberitaan intensif dapat menjadi perhatian masyarakat secara luas. Selain itu, televisi juga menjalankan fungsi *framing*, yaitu membentuk cara suatu peristiwa politik dipahami melalui pemilihan sudut pandang, narasi, visual, narasumber, dan bahasa pemberitaan.

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa televisi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Namun, kekuatan televisi dalam membentuk agenda publik juga harus dijalankan secara bertanggung jawab. Jika pemberitaan politik disusun secara tidak berimbang atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, televisi dapat kehilangan kredibilitas dan justru berkontribusi terhadap bias informasi. Oleh karena itu, peran televisi dalam komunikasi politik sangat bergantung pada kualitas redaksi, independensi editorial, serta komitmen terhadap prinsip jurnalistik.

Kredibilitas Televisi dan Mekanisme Verifikasi Berita

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa kredibilitas televisi sangat ditentukan oleh proses verifikasi berita. Berbeda dari media sosial yang memungkinkan informasi disebarkan secara langsung oleh siapa saja, berita televisi pada umumnya harus melewati proses redaksional sebelum ditayangkan. Proses tersebut meliputi peliputan, konfirmasi sumber, pemeriksaan fakta, penyuntingan naskah, pemilihan visual, dan penilaian kelayakan berita. Mekanisme ini membuat informasi politik yang disampaikan melalui televisi relatif lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi merupakan unsur utama dalam praktik jurnalistik. Kovach dan Rosenstiel (2021) menegaskan bahwa disiplin verifikasi menjadi pembeda mendasar antara jurnalisme dengan propaganda, opini, atau informasi yang tidak teruji. Dalam pemberitaan politik, verifikasi menjadi sangat penting karena informasi yang salah dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat, partai politik, kebijakan negara, maupun institusi pemerintahan. Oleh sebab itu, televisi perlu memastikan bahwa setiap informasi politik yang disiarkan memiliki dasar faktual, bersumber jelas, dan disajikan secara berimbang.

Proses redaksi di televisi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal. Setiap berita yang akan disiarkan tidak hanya dinilai berdasarkan nilai berita, tetapi juga berdasarkan akurasi, relevansi, kepentingan publik, dan potensi dampaknya terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan kerja kolektif antara reporter, produser, editor, redaktur, dan pihak lain yang terlibat dalam produksi berita. Struktur kerja semacam ini menjadi salah satu keunggulan televisi dibandingkan media sosial, karena informasi tidak langsung disebarluaskan tanpa proses penyaringan.

Selain proses verifikasi, kredibilitas televisi juga ditopang oleh penerapan kode etik jurnalistik. Prinsip akurasi, keberimbangan, independensi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam pemberitaan televisi. Kode etik jurnalistik mengharuskan wartawan untuk membedakan fakta dan opini, menghindari fitnah, tidak melakukan manipulasi informasi, serta menjaga kepentingan publik. Dalam konteks penyiaran, tanggung jawab ini semakin penting karena televisi memiliki jangkauan luas dan dapat memengaruhi opini masyarakat secara cepat. Dengan demikian, kredibilitas televisi tidak hanya bergantung pada teknologi penyiaran, tetapi terutama pada integritas profesional lembaga media dan jurnalisnya.

Media Sosial, Disinformasi, dan Fragmentasi Opini Publik

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi politik. Media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat, murah, dan luas. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi produsen dan penyebar informasi. Perubahan ini memiliki dampak positif karena memperluas partisipasi publik dalam diskusi politik. Namun, pada saat yang sama, media sosial juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks, misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik.

Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan gangguan informasi ke dalam beberapa bentuk, termasuk misinformasi dan disinformasi. Misinformasi merujuk pada penyebaran informasi salah tanpa niat untuk menyesatkan, sedangkan disinformasi merupakan informasi salah yang sengaja dibuat dan disebar untuk memanipulasi publik. Dalam konteks politik, disinformasi dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara, atau mengarahkan opini publik pada kepentingan tertentu. Kondisi ini menjadi ancaman bagi demokrasi karena masyarakat dapat membentuk pilihan politik berdasarkan informasi yang keliru.

Media sosial juga bekerja melalui algoritma yang menyesuaikan informasi dengan preferensi pengguna. Akibatnya, pengguna cenderung lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan pandangan politiknya sendiri. Sunstein (2018) menjelaskan bahwa kondisi semacam ini dapat memperkuat ruang gema dan polarisasi karena masyarakat semakin jarang berinteraksi dengan pandangan yang berbeda. Dalam konteks demokrasi, fragmentasi informasi semacam ini dapat melemahkan diskusi publik yang sehat karena dialog rasional digantikan oleh penguatan keyakinan kelompok masing-masing.

Di tengah kondisi tersebut, televisi memiliki potensi untuk berperan sebagai penyeimbang informasi. Televisi dapat menyediakan rujukan informasi yang lebih terverifikasi, terutama ketika isu politik berkembang cepat di media sosial. Ketika sebuah isu viral belum tentu benar, media televisi dapat mengambil peran untuk melakukan klarifikasi, menghadirkan narasumber yang relevan, serta menjelaskan konteks peristiwa secara lebih sistematis. Dengan demikian, televisi tidak harus dipahami sebagai pesaing media sosial, melainkan sebagai institusi informasi yang dapat membantu mengoreksi, menyeimbangkan, dan memperjelas informasi politik yang beredar di ruang publik.

Kontribusi Televisi terhadap Kualitas Demokrasi

Kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia bagi warga negara. Demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi dalam bentuk pemilihan umum, tetapi juga membutuhkan warga negara yang mampu memahami isu, menilai kebijakan, mengawasi kekuasaan, dan terlibat dalam diskusi publik secara rasional. Dalam hal ini, televisi berperan sebagai penyedia informasi politik yang dapat mendukung terbentuknya partisipasi politik yang sadar atau *informed participation*.

Televisi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Melalui pemberitaan investigatif, laporan kebijakan publik, wawancara pejabat, dan diskusi politik, televisi dapat membantu masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi ini sejalan dengan peran media dalam demokrasi sebagai pengawas kekuasaan dan penyedia ruang publik. McQuail dan Deuze (2020) menjelaskan bahwa media massa memiliki fungsi penting dalam menyediakan informasi, membentuk opini, mengawasi lingkungan sosial-politik, dan menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan institusi kekuasaan.

Dalam konteks pemilu, televisi memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai kandidat, partai politik, program kerja, isu kebijakan, dan proses penyelenggaraan pemilihan. Informasi tersebut dapat membantu pemilih membuat keputusan politik secara lebih rasional. Selain itu, debat kandidat yang disiarkan melalui televisi juga dapat menjadi sarana pendidikan politik karena masyarakat dapat membandingkan gagasan, kapasitas, dan cara kandidat merespons persoalan publik. Dengan demikian, televisi berkontribusi terhadap kualitas demokrasi melalui penyediaan informasi politik yang lebih terstruktur dan mudah diakses.

Namun, kontribusi televisi terhadap demokrasi tidak bersifat otomatis. Televisi hanya dapat mendukung kualitas demokrasi apabila menjalankan fungsi jurnalistik secara independen dan profesional. Jika televisi terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik pemilik media, orientasi komersial, atau tekanan rating, maka pemberitaan politik dapat menjadi bias dan kehilangan fungsi edukatifnya. Dalam konteks Indonesia, isu kepemilikan media dan afiliasi politik pemilik media masih menjadi tantangan penting bagi independensi redaksi. Tapsell (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan media dapat memengaruhi agenda pemberitaan dan relasi antara media, kekuasaan, dan kepentingan politik. Oleh karena itu, kredibilitas televisi harus terus dijaga melalui transparansi redaksi, keberimbangan pemberitaan, dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.

Tantangan dan Adaptasi Televisi di Era Digital

Meskipun televisi masih memiliki kredibilitas sebagai media arus utama, perkembangan media sosial dan platform digital telah mengubah perilaku audiens. Generasi muda cenderung mengakses informasi melalui gawai, media sosial, dan platform video digital. Perubahan ini menuntut televisi untuk melakukan adaptasi agar tetap relevan. Adaptasi tersebut dapat dilakukan melalui konvergensi media, distribusi konten melalui platform digital, penggunaan data dalam peliputan, serta penguatan format berita yang lebih interaktif.

Namun, adaptasi digital tidak boleh membuat televisi kehilangan prinsip dasar jurnalistik. Tantangan utama dalam konvergensi media adalah tekanan untuk mengikuti logika media sosial, seperti kecepatan, sensasionalisme, judul provokatif, dan pencarian

keterlibatan audiens. Jika televisi terlalu mengikuti pola tersebut, maka keunggulan utamanya sebagai media yang terverifikasi dapat melemah. Oleh karena itu, televisi perlu mengembangkan strategi digital yang tetap berlandaskan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab publik.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa televisi masih memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di era media sosial. Televisi dapat menjadi sumber informasi politik yang kredibel karena memiliki mekanisme verifikasi, struktur redaksional, regulasi penyiaran, dan prinsip etika jurnalistik. Akan tetapi, peran tersebut harus terus dijaga melalui independensi media, peningkatan kualitas pemberitaan, serta adaptasi digital yang tidak mengorbankan nilai-nilai jurnalistik. Dalam ekosistem informasi yang semakin kompleks, televisi yang kredibel dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap arus informasi digital, memperkuat rasionalitas publik, dan mendukung terbentuknya ruang demokrasi yang lebih sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa televisi masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi politik yang kredibel di era media sosial. Meskipun pola konsumsi informasi masyarakat semakin bergeser ke platform digital, televisi tetap memiliki keunggulan melalui mekanisme verifikasi berita, struktur redaksional yang terorganisasi, regulasi penyiaran, serta penerapan kode etik jurnalistik. Keunggulan tersebut menjadikan televisi relatif lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan media sosial yang bersifat terbuka, cepat, dan sering kali tidak disertai proses pengendalian informasi yang memadai.

Dalam konteks demokrasi, televisi berkontribusi terhadap penyediaan informasi politik yang akurat, berimbang, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang terverifikasi menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya partisipasi politik yang rasional, pengawasan publik terhadap kekuasaan, serta pengambilan keputusan politik yang lebih sadar. Di tengah maraknya hoaks, misinformasi, disinformasi, dan polarisasi opini di ruang digital, televisi dapat berperan sebagai penyeimbang informasi dengan menyediakan rujukan berita yang lebih stabil dan dapat dipercaya.

Namun, peran televisi sebagai penjaga kualitas demokrasi tidak berlangsung secara otomatis. Kredibilitas televisi sangat bergantung pada kemampuannya menjaga independensi redaksi, menghindari tekanan kepentingan politik dan ekonomi, serta menerapkan prinsip akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial secara konsisten. Apabila televisi gagal menjaga prinsip-prinsip tersebut, maka posisinya sebagai sumber informasi politik yang kredibel dapat melemah dan berisiko ikut memperkuat bias serta polarisasi di ruang publik.

Selain itu, televisi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar jurnalistik. Konvergensi dengan platform digital dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan informasi politik, khususnya kepada generasi muda. Namun, adaptasi tersebut harus dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab agar televisi tidak terjebak dalam logika kecepatan, sensasionalisme, dan pencarian keterlibatan audiens semata. Dengan mempertahankan profesionalisme, independensi, dan

etika jurnalistik, televisi masih memiliki potensi besar untuk mendukung terbentuknya ruang publik yang sehat, memperkuat literasi politik masyarakat, dan menjaga kualitas demokrasi di era media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *Pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. *Communication Theory*, 16(4), 411–426. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran*. Komisi Penyiaran Indonesia. https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (4th ed.). Crown.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- McQuail, D., & Deuze, M. (2020). *McQuail's media and mass communication theory* (7th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield International.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.